

**Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi  
Dan Transaksi Elektronik (ITE) Dalam Pengawasan Berita Hoax  
Di Kota Tanjungpinang**

**Oleh :  
SARI AFRIANI  
NIM. 160563201022**

**ABSTRAK**

Implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ialah salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan penyebaran berita hoax di media sosial yaitu memberikan kepastian hukum pidana berdasarkan pasal 45A dalam transaksi elektronik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dan (2) mengenai penyebaran berita hoax di media sosial yaitu Facebook, Instagram, Whastapp, Twitter. Tujuan penelitian implementasi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik membahas dan mengatur fenomena penyebaran berita hoax di media sosia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif terdapat sebanyak 17 informan dalam penelitian dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini dilihat dari Teori van Metter dan Van Horn yaitu; dimensi standar dan sasaran kebijakan pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah tepat sasaran sesuai dengan SOP yang di tetapkan. Pada dimensi sumber daya yaitu kuantitas sumber daya manusia yaitu pegawai Diskominfo masih tidak mencukupi, perlunya pemenuhan sarana prasaran di beberapa bidang. Pada dimensi Komunikasi antar organisasi yaitu komunikasi yang dilakukan Diskominfo kepada instansi lain yaitu Kapolres Tanjungpinang telah efisien hal ini terbukti dengan dilakukannya sosialisasi penyebaran berita hoax kepada masyarakat dan anak sekolah di media sosial. Pada dimensi Karakteristik organisasi yaitu pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik memiliki peran dan tugas serta koordinasi yang jelas dan telah sesuai dengan yang telah ditetapkan. Pada dimensi lingkungan sosial, ekonomi dan politik yaitu kondisi sosial, ekonomi dan politik Kota Tanjungpinang memberikan dorongan yang positif dalam implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dalam pengawasan berita hoax di Kota Tanjungpinang. Pada dimensi diposisi implementor yaitu Diskominfo Kota Tanjungpinang memahami, menerima dan mendukung keberhasilan pelaksanaan Undang-Undang Informasin dan Transaksi Elektronik.

**Kata Kunci: Pengawasan, Media Sosial, Berita Hoax.**

***Implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Information and  
Electronic Transactions (ITE) in Supervision of Hoax News in  
Tanjungpinang City***

**By:  
SARI AFRIANI  
NIM. 160563201022**

***ABSTRACT***

The implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions (ITE) is one of the efforts to overcome the problem of spreading hoax news on social media, namely providing criminal law certainty based on article 45A in electronic transactions as referred to in Article 28 paragraph (1) and (2) regarding the spread of hoax news on social media, namely Facebook, Instagram, Whastapp, Twitter. The purpose of research on the implementation of Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions is to discuss and regulate the phenomenon of spreading hoax news on social media. The research methodology used is descriptive research with a qualitative approach, there are 17 informants in the study using data collection techniques, namely Observation, Interview and Documentation. The results of this study are seen from the theory of van Metter and Van Horn, namely; standard dimensions and policy objectives for the implementation of the Information and Electronic Transaction Law are right on target in accordance with the SOPs that have been set. In the dimension of resources, namely the quantity of human resources, namely Diskominfo employees, it is still insufficient, the need for infrastructure facilities in several fields is needed. In the dimension of communication between organizations, namely the communication carried out by Diskominfo to other agencies, namely the Tanjungpinang Police Chief, this has been efficient, this is proven by the dissemination of hoax news to the public and school children on social media. In the dimensions of organizational characteristics, the parties involved in the implementation of the Information and Electronic Transaction Law have clear roles and duties and coordination and are in accordance with what has been determined. In the dimensions of the social, economic and political environment, namely the social, economic and political conditions of Tanjungpinang City, it provides a positive impetus in the implementation of the Information and Electronic Transactions Law (ITE) in monitoring hoax news in Tanjungpinang City. In the dimension of the disposition of the implementor, the Tanjungpinang City Communication and Information Office understands, accepts and supports the successful implementation of the Law on Information and Electronic Transactions.

***Keywords: Supervision, Social Media, Hoax News.***